

BUKA RAKOR, PJ BUPATI TEGAL MINTA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROAKTIF RAIH TARGET PENDAPATAN DAERAH



Sumber Gambar:

<https://zonatotabuan.co/wp-content/uploads/2021/12/images-32.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL – Penjabat (Pj) Bupati Tegal Agustyarsyah membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Operasional Pendapatan Triwulan Pertama Tahun 2024. Kegiatan digelar secara daring di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal, Kamis 02 Mei 2024.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Tegal meminta dinas pengampu pendapatan daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait proaktif mengoptimalkan capaian perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, juga harus inovatif, profesional dan akuntabel. "OPD harus lebih aktif berkontribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tegal," katanya.

Menurut Agustyarsyah, dirinya juga meminta OPD bisa mengamati dan meniru inovasi daerah lain yang dinilai lebih baik dalam meraih target PAD. Sebab, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan PAD.

"Tetapi PAD juga tidak akan berkontribusi maksimal jika perolehannya tidak optimal. Sehingga di sini OPD harus fokus mencari cara untuk mengoptimalkan perolehan PAD," ujarnya.

Selanjutnya, Agustyarsyah juga meminta OPD berlomba-lomba meningkatkan kepercayaan publik. Sebab hal itu, memainkan peran penting dalam agenda pembangunan di negeri ini.

Tak lupa dirinya juga mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat Kabupaten Tegal yang sudah taat menjalankan kewajibannya. Yakni, membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengungkapkan realisasi PAD pada triwulan pertama tahun 2024 ini sudah mencapai Rp139,38 miliar atau 24,87 persen dari target akhir tahun yang sebesar Rp560,38 miliar. Angka tersebut naik 5,02 persen poin jika dibandingkan dengan 2023 lalu yang sebesar 19,85 persen atau senilai Rp113,33 miliar.

"Saya meminta perangkat daerah bisa meningkatkan pelayanan dan mempermudah akses bagi wajib pajak maupun retribusi dalam proses pembayarannya. Utamanya, akses pembayaran digital," terangnya.

Itu, kata Sekda, untuk memudahkan wajib pajak membayarkan pajaknya melalui fitur pada aplikasi perbankan, transfer rekening melalui ATM, dan sistem pembayaran secara online. Dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang sudah tersedia di gerai-gerai toko waralaba.

"Saya garis bawahi, perlunya OPD pengampu pendapatan memberikan layanan informasi. Serta sistensi yang mudah diakses wajib pajak dan pembayar retribusi daerah," tandasnya.

Menurut Sekda, untuk mencapai target, juga harus memperkuat tata kelola pajak dan retribusi daerah. Dengan menerapkan sistem yang transparan dan akuntabel dalam pelaporannya serta melakukan monitoring secara berkala.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya penegakan hukum perpajakan dan pemberian sanksi yang tegas. Bagi wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan berlaku.

"Penegakan hukum di bidang perpajakan ini sendiri, dimulai dari imbauan, penagihan secara pasif dan aktif. Hingga, pemblokiran, pemeriksaan, hingga tahap penyidikan," terangnya.

Sekda menambahkan, lenegakan hukum ini harus dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitasnya, termasuk melakukan penyesuaian kebijakan jika memang diperlukan. (*) (Teguh Mujiarto)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/697419/buka-rakor-pj-bupati-tegal-minta-opd-proaktif-raih-target-pendapatan-daerah/15>, "Buka Rakor, Pj Bupati Tegal Minta OPD Proaktif Raih Target Pendapatan Daerah", tanggal 7 Mei 2024.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/05/03/pj-bupati-tegal-minta-opd-proaktif-raih-target-pendapatan-daerah/>, "Pj Bupati Tegal Minta OPD Proaktif Raih Target Pendapatan Daerah", tanggal 3 Mei 2024.
3. <https://www.ayotegal.com/tegal-roya/3412611653/pj-bupati-tegal-minta-opd-proaktif-raih-target-pendapatan-daerah-tiru-inovasi-daerah-lain-yang-lebih-baik>,

“Pj Bupati Tegal Minta OPD Proaktif Raih Target Pendapatan Daerah, Tiru Inovasi Daerah Lain yang Lebih Baik”, tanggal 7 Mei 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05